

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era reformasi ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Otonomi daerah banyak menuntut pada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya "*good government.*"

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman.

Laporan Keuangan adalah sebagai media bagi sebuah entitas dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Dimana Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Keberadaan akuntansi merupakan sumber data yang sangat diperlukan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, kreditor, pemilik perusahaan dan manajemen. Dalam hal ini pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendali transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Peran akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan menjadi semakin penting untuk dunia usaha. Bagi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah sangat memerlukan informasi ekonomi ini yang digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Walaupun demikian, masih diperlukan adanya penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan adanya akuntansi yang khusus mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pajak menurut Mardiasmo (2016, h 3) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) juga terdapat dalam konteks akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Informasi yang dihasilkan adalah berupa laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai. Sistem penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari transaksi yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak hasil pajak dan retribusi daerah, pendapatan dari hasil perusahaan daerah, melakukan pinjaman ke pihak lain dan usaha-usaha lain daerah yang sah.

Dari keempat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan pada daerah. Kewajiban daerah dalam menjalankan berbagai pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Kota Bekasi merupakan kota yang cukup maju dengan penerimaan pajak daerah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya, maka pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah memerlukan peran akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

Melihat betapa pentingnya suatu efektifitas sistem dalam menghasilkan sebuah data/informasi yang dapat diandalkan, apalagi berkaitan dengan angka pendapatan suatu daerah, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian yang berjudul **Analisis Sistem Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Pencatatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi?
2. Bagaimana Sistem Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Pencatatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui Sistem Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bekasi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Dengan adanya penulisan ini dapat menambah pengetahuan mengenai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah terutama dalam hal penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat digunakan menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penerapan sistem pencatatan dan pelaporan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta untuk menerapkan teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan ke dalam praktik yang sesungguhnya.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Memberikan informasi kepada instansi terkait yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengenai pentingnya penerapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan pada penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca serta menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Di setiap penerimaan pajak daerah pasti ada perhitungan keuangan yang harus diketahui sehingga dibutuhkan sistem pencatatan yang baik. Agar penulisan ini lebih terarah, penulis menitik beratkan permasalahan pada **“Analisis Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.”**

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Definisi Pajak, dan Definisi Pajak Daerah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai analisis sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada badan pendapatan daerah Kota Bekasi.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan berdasarkan analisis serta penelitian yang telah dilakukan serta memberikan implikasi manajerial yang berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.

